

SIARAN PERS
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
terkait Penyerahan LHP atas LKPD TA 2015
Rabu, 15 Juni 2016

Pada hari ini, Rabu 15 Juni 2016, bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, kami telah menyerahkan LHP atas LKPD TA 2015 pada 7 Kabupaten, yaitu Kab. Banggai Laut, Morowali Utara, Buol, Parigi Moutong, Banggai, Tojo Una-una dan Kota Palu. Penyerahan LHP kali ini begitu spesial, karena pada tahun ini, pertama kalinya diterapkan LKPD berbasis akrual, sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. LKPD berbasis akrual terdiri dari 7 laporan yang harus disajikan oleh pemda, yaitu: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 16 menyatakan LHP atas Laporan Keuangan memuat opini. Ada 4 macam opini yang diberikan BPK, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP/Disclaimer) dan Tidak Wajar (TW).

Pada penyerahan LHP hari ini atas 7 Kabupaten dan Kota, BPK memberikan opini:

1. WTP kepada 3 Pemda yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Una Una dan Kota Palu;
2. 2 Pemda memperoleh opini WDP yaitu Kab. Buol dan Kab. Parigi Moutong;
3. Tidak Menyatakan Pendapat kepada 2 Pemda yaitu Kab. Morowali Utara dan Kab. Banggai Laut.

Adapun temuan signifikan yang dapat disampaikan adalah :

1. **Kab. Banggai terdapat kelemahan signifikan pada Kelemahan SPI** atas pengelolaan pendapatan, yaitu terhadap kelengkapan perangkat peraturan perundang-undangan, database perpajakan dan retribusi beserta pemutakhiran datanya, pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum terkoordinasi secara memadai dengan SKPD teknis, dan pengendalian atas

pelaksanaan pemungutan retribusi yang belum memadai. Sedangkan permasalahan yang ditemukan pada LKPD Tahun 2015 adalah: Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tidak menerima data perhitungan atas penjualan tenaga listrik dari PT PLN; dan Dispenda belum melaksanakan tugasnya sesuai Perbup.

2. Kab. Tojo Una-una

- a. Pengelolaan asset tetap belum tertib;
- b. Penatausahaan dana BOS belum tertib

Akibat kekurangtertiban tersebut, maka pendapatan dan beban atas penggunaan anggaran dana BOS Pusat TA 2015 juga tidak diketahui sehingga belum dikonsolidasikan ke dalam Laporan Operasional

- c. Pekerjaan 7 paket peningkatan jalan pada Dinas PU tidak sesuai kontrak senilai Rp1,24 M;
- d. Pengadaan 2 paket Alkes dan 2 unit ambulans RSUD Ampana belum dikenakan denda keterlambatan dan pemborosan senilai Rp1,15 M.

3. Kota Palu

- a. Realisasi Belanja Dukungan Pembiayaan untuk Mahasiswa pada President University Jababeka pada Sekretariat Kota Palu senilai Rp1,04 Miliar tidak sesuai ketentuan

Belanja barang jasa berupa pemberian beasiswa kepada mahasiswa asal Palu yang bersekolah di President University Jababeka tidak memenuhi kriteria kelayakan penerima beasiswa, sehingga BPK menyimpulkan pemberian beasiswa tersebut tidak layak sebesar Rp1,04 Miliar.

- b. Pekerjaan Perkerasan Jalan Tidak Sesuai dengan Kontrak sebesar Rp2,78 Miliar Pekerjaan jalan berupa perkerasan jalan lapis aspal beton (laston) mengalami kekurangan volume sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp373 Juta; selain itu terdapat kekurangan volume pada pekerjaan penghamparan Lapis penertrasi macadam (Lapen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp2,4 miliar.

4. Kab. Buol

- a. Pengendalian kas belum sepenuhnya efektif menjamin keamanan fisik dan akurasi penyajian saldo kas di neraca;

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) belum memiliki prosedur pengawasan yang memadai atas pengelolaan dana oleh pihak sekolah.

- b. Pengendalian atas pengelolaan investasi pada PD Berkah dan PDAM Motanang belum efektif mencegah terjadinya penyimpangan;

Nilai investasi pemerintah daerah yang diperoleh dari nilai ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan PD Berkah dan PDAM Motanang tidak dapat diyakini kewajarannya, karena tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai. Selain itu, terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

- c. Pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum efektif mencegah terjadinya penyimpangan.

Terdapat kelemahan dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan yang berdampak pada kelebihan pembayaran, kekurangan volume, kekurangan penerimaan, maupun kerugian daerah.

5. Kab. Parigi Moutong

- a. Permasalahan pengelolaan Aset Tetap

- Terdapat beberapa kelemahan yaitu terdapat perbedaan saldo Aset Tetap antara nilai aplikasi SIPKD dengan SIMDA BMD yang berdampak pada perhitungan akumulasi penyusutan dan saldo akhir Aset Tetap yang tidak dapat dijelaskan.

- b. Kelemahan penatausahaan Piutang

- Piutang pada BLUD RSUD Anuntalako tahun 2013 yaitu Klaim/tagihan retribusi kesehatan sebesar Rp676,55 juta belum didukung hasil verifikasi dan konfirmasi dari pihak ketiga;

- Pengelolaan piutang Tagihan Pembayaran Air Bersih/SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1,70 miliar belum dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan rincian tagihan.

6. Kab. Morowali Utara

- a. Aset Tetap belum disajikan secara wajar, diantaranya;
 - 50 bidang tanah tidak memiliki nilai dan tanah dengan luasan nol dinilai sebesar Rp8,82 miliar
 - penghitungan penyusutan Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri sebesar Rp18,96 miliar
 - Aset Gedung dan Bangunan tidak memiliki keterangan dokumen dan tahun pengadaan sebesar Rp183,15 miliar, penyusutan Gedung dan Bangunan tidak dapat ditelusuri sebesar Rp56,56 miliar
 - Aset Tetap tidak diketahui lokasi keberadaannya sebesar Rp2,49 miliar.
- b. Penyajian Persediaan minimal sebesar Rp7.365.412.319,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan belum ditatausahakan dengan tertib;
 - Satuan kerja pengelola persediaan tidak menyelenggarakan pencatatan dan penatausahaan Persediaan secara memadai sehingga nilai Persediaan minimal sebesar Rp7,36 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
- c. Mekanisme PHO dan Penyusunan HPS atas Belanja Modal dengan nilai minimal sebesar Rp48.195.272.000,00 miliar masih belum memadai karena
 - Morowali Utara belum melaksanakan mekanisme Provisional Hand Over (PHO) dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara memadai atas Belanja Modal minimal sebesar Rp48,19 miliar.
 - Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini nilai Belanja Modal tersebut.

7. Kab. Banggai Laut

- a. Pengelolaan Kas Pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Belum Memadai
 - Terdapat ketekoran kas pada empat SKPD sebesar Rp99.066.750,00;
 - Pengelolaan kas di bendahara penerimaan RSUD tidak sesuai ketentuan.
- b. Penyajian Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Kabupaten Banggai Laut TA 2015 Berbasis AkruaI Belum Memadai
 - Aset hibah dari Kabupaten Induk belum disajikan dalam neraca sebesar Rp332.196.313.895,33;
 - Rehabilitasi, perencanaan, dan pengawasan aset tidak dikapitalisasi pada aset induk.
- c. Pengelolaan persediaan belum memadai
 - Masih terdapat persediaan barang dan obat dari dana JKN yang belum disajikan pada RSUD Banggai;
- d. Penatausahaan utang belum tertib
 - Penyajian nilai utang PFK tidak didukung dengan dokumen pendukung yang memadai;
- e. Pemahalan harga atas pengadaan elektronik
 - Pengadaan alat-alat elektronik pada enam bagian di Sekretariat Daerah dan 12 SKPD melebihi harga pasar senilai Rp913.005.229,00.

Demikian resume LHP 7 Kabupaten dan Kota atas LKPD TA 2015, selanjutnya kami menunggu tindak lanjut atas temuan tersebut diatas selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP diterbitkan.

HUMAS BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH